

BAB I

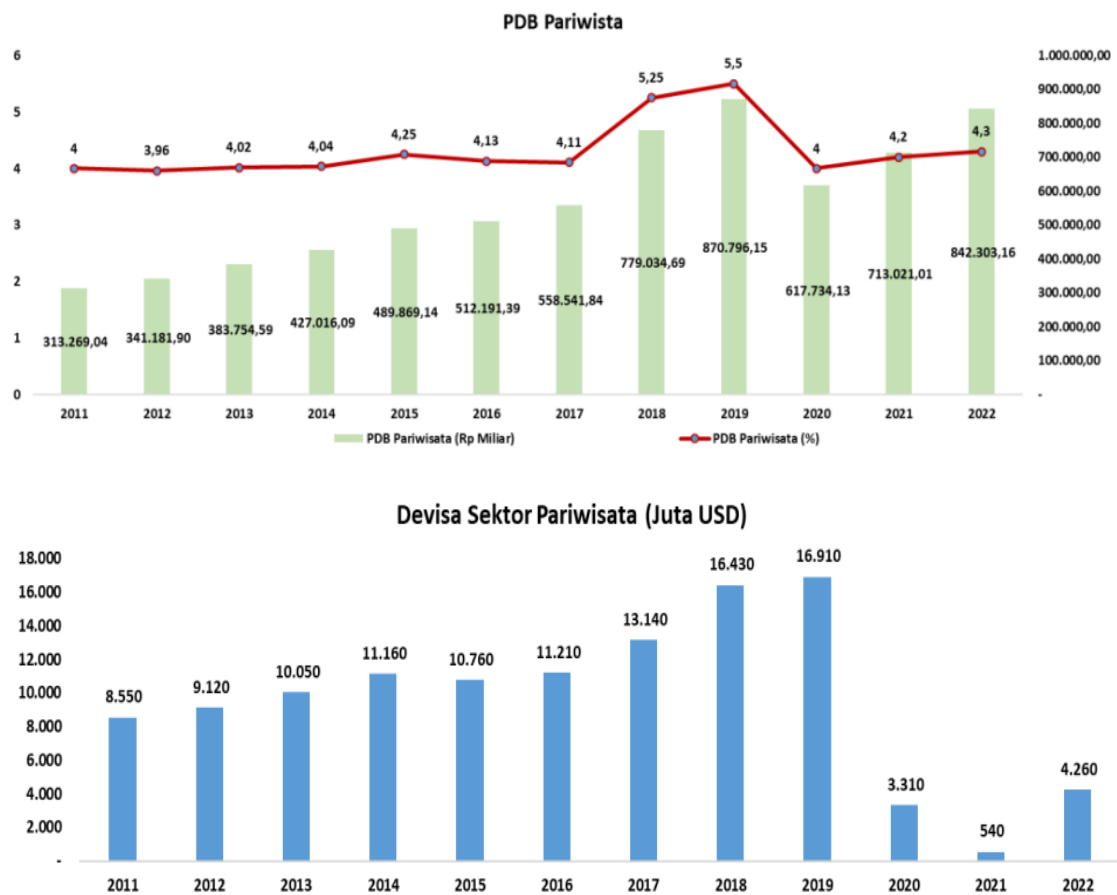
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pariwisata sebagai sektor ekonomi yang kuat, memiliki potensi untuk berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap tujuan *Sustainable Development Goals* utamanya pada tujuan ke-1 yaitu pengentasan kemiskinan, dan tujuan ke-8 yaitu pertumbuhan ekonomi inklusif serta pekerjaan yang layak. Hal tersebut juga termaktub dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata bahwa pariwisata memiliki fungsi dalam menaikkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, menaikkan pertumbuhan ekonomi, menanggulangi kemiskinan dan mengatasi pengangguran.

Pandemi Covid-19 mengakibatkan efek domino terhadap sektor pariwisata global termasuk Indonesia seperti penurunan perolehan jumlah devisa negara karena jumlah wisatawan berkunjung juga berkurang dan pengangguran karena adanya pemutusan hubungan kerja (PHK).

Gambar 1.1
Perkembangan PDB dan Devisa Pariwisata



Sumber : Badan Pusat Statistik (2023)

Mengacu pada gambar 1.1, dapat diketahui bahwa pada tahun 2020, kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB mengalami penurunan akibat Pandemi Covid-19 dari 5,5% pada tahun 2019 menjadi 4%, penurunan nilai devisa pariwisata tahun 2020 dari 16.480 Juta USD pada tahun 2019 menjadi 3.310 Juta USD. Penurunan PDB dan devisa tersebut berbanding lurus dengan penurunan jumlah kunjungan wisatawan dari 1.388,72 ribu pengunjung di tahun 2019 menjadi 148,98 ribu pengunjung di tahun 2020. Berdasarkan laporan *World Travel and Tourism Council* (WTTF) menyatakan bahwa

pandemi covid-19 memiliki pengaruh negatif terhadap pekerja di sektor pariwisata yang menyebabkan 50 juta orang mengalami kehilangan pekerjaan.

United Nations World Tourism Organization (UNWTO) sebagai organisasi pariwisata dunia, mengambil langkah strategis dalam rangka membangkitkan kembali sektor pariwisata global dengan mengajukan usulan kebijakan transformatif berupa pengembangan desa wisata yang berfokus pada pemanfaatan dampak terhadap destinasi yang dikunjungi dan strategi inovasi, digitalisasi, kolaborasi, keberlanjutan serta kemitraan untuk membangun komunitas dan bisnis yang lebih kuat. Pengembangan desa wisata menjadi salah satu pembahasan krusial karena berkontribusi terhadap penyediaan layanan dan kebutuhan masyarakat di daerah terpencil, mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan, penyediaan pelatihan keterampilan dan penyediaan akses lapangan pekerjaan, pelestarian budaya dan lingkungan hidup dalam rangka pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

Pada prinsipnya, usulan kebijakan pemulihan sektor pariwisata dari *United Nations World Tourism Organization (UNWTO)* sejalan dengan kebijakan pemerintah yang termuat dalam dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Dalam RPJMN tahun 2020-2024, untuk menciptakan transformasi sosial, budaya, dan ekonomi desa maka desa wisata adalah sebuah solusi yang berfungsi sebagai sarana membangun desa secara terintegrasi sehingga menumbuhkan kemandirian desa, dan di tahun 2020 sampai dengan

tahun 2024, pemerintah memiliki target yaitu 244 desa wisata tersertifikasi menjadi desa wisata mandiri (Fasa, 2022).

Dalam usaha mencapai target sasaran, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendukung kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam rangka memacu pengembangan daya tarik wisata daerah. Hal ini dilakukan karena pembangunan daerah menjadi suatu bagian terpadu yang tidak bisa dipisahkan dari pembangunan nasional dan dijalankan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan nyata daerah. Bentuk implikasi kebijakan nasional, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata. Regulasi tersebut merupakan bukti nyata Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka mengembangkan potensi pariwisata sebagai roda penggerak perekonomian daerah khususnya pada skala desa.

Jumlah desa wisata per semester 1 pada tahun 2022 di Jawa Tengah mengalami peningkatan sebanyak 101 desa wisata dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 717 desa wisata yang kemudian bertambah menjadi 818 desa wisata (jatengprov.go.id). Desa wisata tersebut memicu bangkitnya perekonomian masyarakat Jawa Tengah pasca pandemi covid-19. Hal tersebut searah dengan komitmen yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mendorong kemajuan desa wisata melalui peningkatan kualitas sarana prasarana dan sumber daya manusia dengan memberikan dana stimulan melalui bantuan keuangan bagi ratusan desa wisata agar meningkatkan

kunjungan wisatawan (Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah, 2023).

Amanat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 menyatakan bahwa pengembangan daya tarik desa wisata dilaksanakan oleh pengelola desa wisata dan dapat dilakukan bersama-sama dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan pengusaha secara sinergi dengan prinsip integrasi dan koordinasi. Dari berbagai daerah di Provinsi Jawa Tengah, hampir semuanya melakukan upaya pengembangan sektor pariwisata yang dimilikinya. Hal itu juga dilaksanakan oleh salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yakni Kabupaten Brebes. Sebagai tindak lanjut kebijakan di tingkat provinsi, Pemerintah Kabupaten Brebes mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 11 Tahun 2021 tentang Desa Wisata.

Brebes adalah sebuah kabupaten paling luas di urutan kedua di Provinsi Jawa Tengah dengan kontur geografis yang mencakup dataran pegunungan, lembah hingga pantai dan laut. Didukung kondisi geografis tersebut, Kabupaten Brebes memiliki potensi wisata alam yang beragam dan baik untuk dikembangkan agar menjadi penggerak perekonomian salah satunya melalui desa wisata. Mengacu pada data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Brebes, jumlah desa wisata di Kabupaten Brebes mengalami kenaikan selama rentang tahun 2017 hingga 2021. Data tersebut dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 1.1

Persentase Desa Wisata di Kabupaten Brebes Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Desa Wisata	2	6	7	10	10
Jumlah Desa	292	292	292	292	292
Persentase	0,68	1,71	2,39	3,42	3,42

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Brebes

Pada tabel 1.1 yang tertera diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 jumlah desa wisata di Kabupaten Brebes hanya dua, ditahun 2018 meningkat menjadi 6 (enam), ditahun 2019 meningkat menjadi 7 (tujuh) dan pada tahun 2020-2021 meningkat menjadi 10 (sepuluh) desa wisata.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Brebes Nomor 430/357 Tahun 2020 tentang Penetapan Desa Wisata di Kabupaten Brebes, berikut ini adalah daftar 10 desa wisata di Kabupaten Brebes.

Tabel 1.2

Daftar Desa Wisata di Kabupaten Brebes

No	Nama Desa Wisata	Kecamatan
1.	Bandungsari	Banjarharjo
2.	Batursari	Sirampog
3.	Ciseureuh	Ketanggungan
4.	Sawojajar	Wanasari
5.	Pandansari	Paguyangan
6.	Kaliwlingi	Brebes
7.	Winduaji	Paguyangan
8.	Winduasri	Salem
9.	Malahayu	Banjarharjo
10.	Limbangan Wetan	Brebes

Sumber : Diolah oleh Penulis (2024)

Dari ke-10 desa wisata di Kabupaten Brebes, salah satu obyek wisata yang menarik perhatian wisatawan adalah Desa Wisata Kaliwlingi. Desa Kaliwlingi merupakan sebuah desa di kawasan pesisir yang mempunyai potensi daya tarik ekowisata hutan mangrove yang menerapkan aspek konservasi dan dipadukan oleh kondisi sosial budaya masyarakat desa yang unik. Sebagai sumber daya alam hayati, hutan mangrove memiliki banyak potensi yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Manfaat yang dirasakan berupa berbagai produk dan jasa. Pemanfaatan produk dan jasa tersebut telah memberikan tambahan pendapatan dan bahkan merupakan penghasilan utama dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat (Joandani, 2019).

Pemanfaatan nilai tambah kawasan hutan mangrove menjadi wisata di Desa Kaliwlingi didukung oleh hasil *joint research* antara Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah (Baperlitbangda) Kabupaten Brebes dengan Universitas Gadjah Mada pada tahun 2016. Wisata ini diresmikan pada 6 April tahun 2016 dan dikelola oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dewi Mangrove Sari dan resmi menjadi desa wisata pada tahun 2020 berdasarkan SK Bupati Brebes No. 430/357 Tahun 2020 tentang Penetapan Desa Wisata di Kabupaten Brebes.

Gambar 1.2
Daya Tarik Wisata Mangrove di Desa Wisata Kaliwlingi



Sumber : Jaringan Desa Wisata Kemenparekraf RI (2023)

Desa Wisata Kaliwlingi merupakan satu diantara desa wisata yang pernah meraih peringkat 300 besar penghargaan Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) Tahun 2021 dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Desa Wisata Kaliwlingi kemudian dinobatkan sebagai desa wisata dengan kategori maju. Menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terdapat 4 (empat) kategori desa wisata yaitu desa wisata rintisan, desa wisata berkembang, desa wisata maju dan desa wisata mandiri. Kategori tersebut didasarkan pada indikator kunci yang ditinjau pada potensi wisata dan kesadaran masyarakat, kunjungan wisatawan, sarana dan prasarana serta fasilitas wisata, pendampingan, pemanfaatan dana desa, pengelolaan, dampak ekonomi dan digitalisasi. Kategori desa wisata tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut pada tabel berikut.

Tabel 1.3
Kategori Desa Wisata

Indikator Kunci	Rintisan	Berkembang	Maju	Mandiri
Potensi Wisata dan Kesadaran Masyarakat	Masih berupa potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadi destinasi wisata	Sudah mulai dikenal	Sudah menjadi destinasi wisata yang dikenal	-
	Kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata belum tumbuh	Kesadaran masyarakat mulai tumbuh	Masyarakat sudah sepenuhnya sadar akan potensi wisata	-
Kunjungan Wisatawan	Belum/masih sedikit kunjungan wisatawan, pengunjung masih dari masyarakat sekitar	Dikunjungi masyarakat sekitar dan juga pengunjung dari luar daerah	-	-
Sarpras dan Fasilitas Wisata	Masih terbatas	Sudah terdapat pengembangan sarpras	Sarpras dan fasilitas pariwisata sudah memadai	Sarpras sudah mengikuti standar internasional minimal ASEAN
Pendampingan	Sangat diperlukan	Masih diperlukan	-	-
Pemanfaatan Dana Desa	Memanfaatkan dana desa	-	Masyarakat sudah mampu memanfaatkan dana desa untuk pengembangan desa wisata	-
Pengelolaan	Masih bersifat lokal desa	-	Masyarakat sudah mampu mengelola usaha pariwisata melalui Pokdarwis/kelembagaan kerja lokal	Pengelolaan kolaboratif lintas sektor dan pentahelix sudah berjalan baik
Dampak Ekonomi	Belum mulai tercipta lapangan kerja	Sudah mulai tercipta lapangan kerja dan aktivitas ekonomi	Sistem pengelolaan berdampak pada peningkatan ekonomi	Masyarakat telah memiliki unit kewirausahaan sendiri

			masyarakat dan pendapatan asli desa	
Digitalisasi	-	-	-	Sudah mampu memanfaatkan digitalisasi sebagai bentuk promosi mandiri

Sumber : Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2023)

Selain mempunyai daya tarik wisata yang beragam, pengembangan Desa Wisata Kaliwlingi sebagai destinasi wisata telah memenuhi tiga komponen utama yang terdiri dari aksesibilitas, amenities dan atraksi. Hal tersebut didukung dengan bukti penelitian terdahulu oleh Hapsari (2021) dengan judul penelitian “Strategi Pengembangan Desa Wisata Mangrovesari Berbasis Masyarakat Menuju Mega Mangrove Center di *Era Society 5.0*” yang menunjukkan bahwa Pengembangan Desa Wisata Kaliwlingi telah memenuhi 3 (tiga) komponen yakni :

- a. aspek aksesibilitas, infrastruktur jalan menuju Desa Wisata Kaliwlingi dalam kondisi yang memadai dan beraspal sehingga memudahkan akses transportasi. Lokasi destinasi wisata juga tergolong strategis dengan jarak tempuh 11 kilometer dari ruas jalan pantura.
- b. aspek amenities, fasilitas yang tersedia di Desa Wisata Mangrove relatif lengkap mulai dari tempat ibadah, toilet, rumah makan, gazebo, area parkir, loket, *homestay*, perlengkapan keselamatan air, tempat isi bahan bakar dan dermaga perahu wisata.

- c. aspek atraksi, daya tarik yang ditawarkan oleh Desa Wisata Kaliwlingi sangat beragam mulai dari *tracking* hutan mangrove, berlayar menyusuri hutan mangrove menggunakan perahu, wisata budidaya ikan nener, belajar membatik mangrove, wisata budaya tari sintren, pembuatan souvenir dari limbah kerang, wisata kuliner urab anglur, spot foto kekinian, wisata konservasi kepiting soka dan pembuatan garam rebus.

Pemenuhan tiga komponen pengembangan desa wisata tersebut tidak terlepas dari upaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Brebes sebagai *leading sector* untuk mendorong pengembangan Desa Wisata Kaliwlingi melalui kerjasama dengan beberapa *stakeholders*. Pada komponen aksesibilitas, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Brebes bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum dalam menyediakan infrastruktur jalan. Komponen amenitas, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Brebes bekerjasama dengan Dinas Perikanan Kabupaten Brebes, Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menyediakan fasilitas loket pelayanan, perlengkapan keselamatan air, tempat isi bahan bakar dan dermaga perahu wisata. Komponen atraksi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Brebes bekerjasama dengan Dinas Koperasi, Usaha dan Perdagangan, Perguruan Tinggi dalam menyediakan pelatihan membatik dan pelatihan pemasaran garam rebus, serta Yayasan Kehati dalam menyediakan fasilitas *jogging track*. Keterlibatan dari berbagai pemangku kepentingan tersebut memerlukan komunikasi dan koordinasi sebagai fundamen kolaborasi yang

kuat. Jika kedua hal tersebut gagal maka dapat memicu timbulnya beragam masalah pelaksanaan peran setiap pihak yang berkepentingan dalam pengembangan Desa Wisata Kaliwlingi.

Pelaksanaan program pengembangan Desa Wisata Kaliwlingi di Kabupaten Brebes merupakan kebijakan yang bersifat kompleks sehingga membutuhkan pemangku kepentingan dari berbagai multidisiplin. Akan tetapi, aktor utama yang memiliki peran sentral dalam pelaksanaan kolaborasi hanya melibatkan pihak-pihak tertentu seperti dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Brebes, Pemerintah Desa Kaliwlingi, Pokdarwis Dewi Mangrove Sari, pelaku usaha dan masyarakat. Masing-masing aktor tersebut memiliki tanggung jawab dan porsi yang berbeda serta saling bergantung satu sama lain. Optimal atau tidaknya peran pemangku kepentingan dalam proses kolaborasi dapat dilihat dari tugas, pokok dan fungsi sesuai dengan kedudukan atau jabatan yang dijalankan oleh pemangku kepentingan. Berikut ini disajikan matriks identifikasi aktor dan tugas tanggung jawab dalam pelaksanaan kolaborasi program Pengembangan Desa Wisata Kaliwlingi di Kabupaten Brebes.

Tabel 1.4
Aktor Program Pengembangan Desa Wisata Kaliwlingi
di Kabupaten Brebes

No	Aktor	Aktivitas Dalam Pelaksanaan Kolaborasi Program Pengembangan Desa Wisata Kaliwlingi
1.	Seksi Pengembangan SDM dan Produk Wisata Bidang Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Brebes	a. Memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset-aset daerah yang menjadi daya tarik wisata di Desa Wisata Kaliwlingi b. Memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang di Desa Wisata Kaliwlingi c. Menyediakan informasi dan mempromosikan potensi Desa Wisata Kaliwlingi d. Memberdayakan masyarakat setempat beserta lingkungan alam dan budaya e. Memberikan fasilitasi penyelenggaraan pelatihan sumber daya manusia tentang kepariwisataan daerah sesuai kewenangan daerah f. Mendorong kemitraan usaha pariwisata Desa Wisata Kaliwlingi g. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan
2.	Pemerintah Desa Kaliwlingi	a. Mendorong pengembangan Desa Wisata Kaliwlingi b. Memberikan informasi kepada masyarakat terkait berbagai kebijakan di bidang pengembangan wisata c. Memelihara ketentraman dan ketertiban penyelenggaraan pariwisata di Desa Wisata Kaliwlingi d. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa dalam pengembangan Desa Wisata Kaliwlingi e. Memberikan fasilitasi penyelenggaraan pelatihan sumber daya manusia tentang kepariwisataan daerah sesuai kewenangan desa f. Memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang pariwisata di Desa Wisata Kaliwlingi sesuai kewenangan desa
3.	Pokdarwis Dewi Mangrove Sari	a. Melakukan pengaturan dan pengelolaan Desa Wisata Kaliwlingi yang menyangkut kegiatan atraksi wisata, pendaftaran usaha wisata, sarana dan prasarana, fasilitas dan keamanan b. Melaksanakan pembinaan usaha kepariwisataan c. Menyelenggarakan kerjasama kemitraan dengan pihak ketiga

		d. Melakukan koordinasi dengan pemerintah desa, perangkat daerah dan perangkat daerah provinsi terkait pengembangan Desa Wisata Kaliwlingi
4.	Pelaku Usaha	a. Mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan koperasi b. Mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal c. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa, Perangkat Daerah Teknis dan perangkat daerah yang terkait dengan pengembangan Desa Wisata Kaliwlingi
5.	Masyarakat	a. Membantu menjaga dan melestarikan daya tarik Desa Wisata Kaliwlingi b. Membantu terciptanya sapta pesona wisata c. Menjaga kelestarian lingkungan dan arsitektur lokal Desa Wisata Kaliwlingi d. Ikut serta dalam proses pembangunan Desa Wisata Kaliwlingi dengan pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan dan masukan terhadap pengembangan, informasi potensi dan masalah serta rencana pengembangan Desa Wisata Kaliwlingi

Sumber :

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 11 Tahun 2021
tentang Desa Wisata, (2024)

Sebagai desa wisata maju yang memiliki atraksi wisata hutan mangrove dan berada di tempat terbuka, sarana dan prasarana yang tersedia seperti area *jogging track*, dermaga dan perahu membutuhkan upaya perawatan ekstra untuk menjaga dari kerusakan yang disebabkan oleh faktor alam. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang bekerjasama dengan Pokdarwis Dewi Mangrove Sari yang berperan mengelola sarana dan prasarana dinilai belum maksimal. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya permasalahan kerusakan sarana dan prasarana yang dapat dilihat pada gambar 1.3 berikut.

Gambar 1.3
Kondisi Atraksi Wisata *Tracking Mangrove* di Desa Wisata Kaliwlingi
Pasca Pandemi



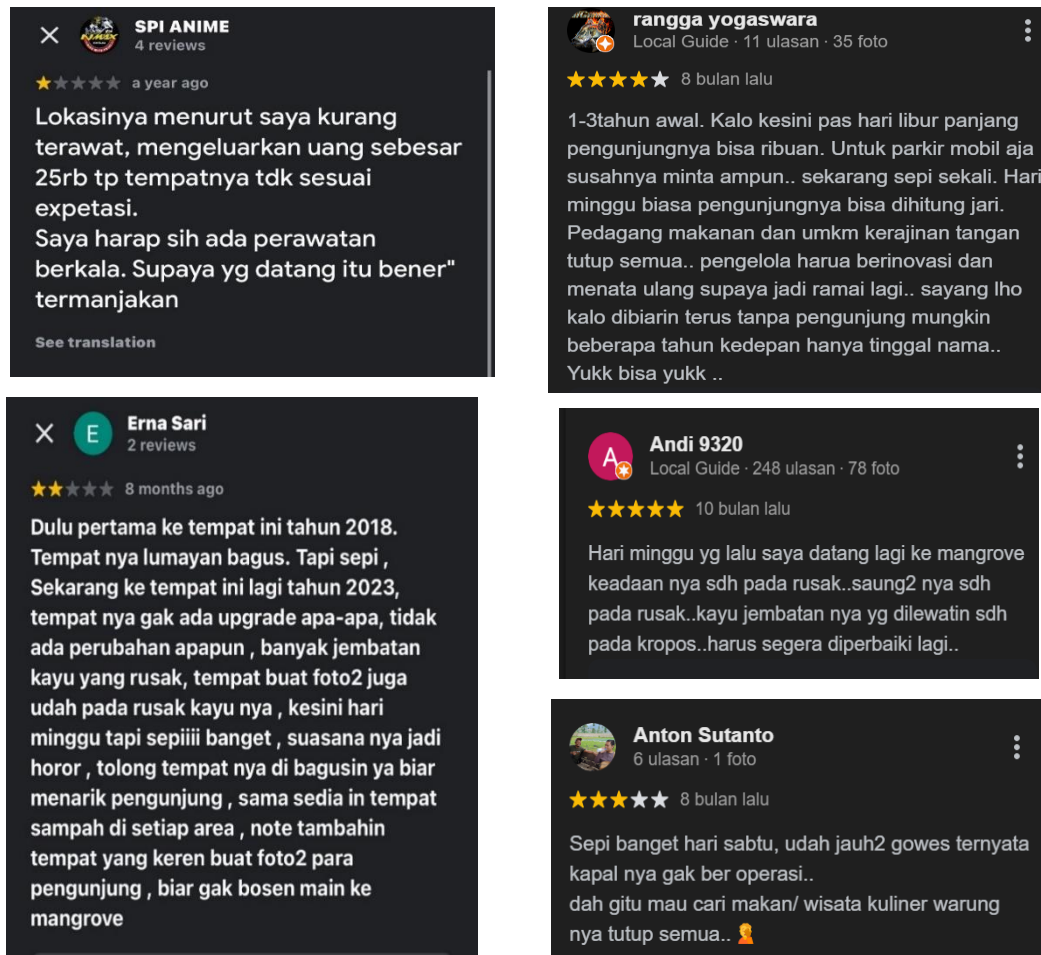
Sumber : Dokumentasi Pribadi (2023)

Berdasarkan gambar 1.3 dapat dilihat bahwa terdapat kerusakan sarana prasarana di area *tracking mangrove* yang meliputi fasilitas tempat duduk, *jogging track*, jembatan dan tempat kuliner yang didominasi menggunakan kayu. Kayu-kayu tersebut mengalami pelapukan akibat cuaca sehingga runtuh. Kerusakan lainnya juga terjadi pada perahu yang digunakan sebagai kendaraan operasional untuk mengangkut wisatawan ke area *tracking mangrove*.

Umumnya kerusakan perahu terjadi di area mesin karena lama tidak digunakan saat pandemi dan kipas perahu yang terkena endapan lumpur. Dari 17 perahu yang tersedia, hanya 5 yang layak untuk digunakan sebagai kendaraan operasional.

Kondisi tersebut tentunya sangat bertolak belakang dengan desa wisata maju pada umumnya yang memiliki sarana dan prasarana memadai. Kondisi tersebut juga mengganggu kenyamanan pengunjung yang sedang berwisata dan dapat mengurangi minat wisatawan untuk berkunjung kembali. Hal itu dapat dibuktikan dari beberapa ulasan wisatawan terhadap daya tarik hutan mangrove di Desa Wisata Kaliwlingi.

Gambar 1.4
Ulasan Google Review Terhadap Daya Tarik Hutan Mangrove
di Desa Wisata Kaliwlingi



Sumber : Diolah Penulis melalui *Google Maps* (2024)

Kondisi permasalahan diatas sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kanita (2023) dengan judul penelitian “*Collaborative Governance* dalam Pengembangan Wisata Goa Pindul Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul” menyatakan bahwa infrastruktur merupakan sarana dan prasarana pembangunan yang dapat

mempermudah wisatawan untuk menikmati dan mengakses wisata secara aman dan nyaman.

Permasalahan yang telah disebutkan diatas memerlukan komunikasi dan koordinasi yang jelas antar *stakeholders* yang terlibat untuk mencapai pemahaman bersama dan menemukan solusi terhadap urgensi pengelolaan sarana dan prasarana yang memadai melalui dialog tatap muka. Dialog tatap merupakan suatu tahapan inti dalam proses kolaborasi untuk berkomunikasi secara langsung dengan pemangku kepentingan yang terlibat. Melalui dialog tatap muka, kebutuhan dan kepentingan dari masing-masing *stakeholders* lebih mudah untuk disatukan sehingga dapat mencapai konsensus atau kesepakatan bersama.

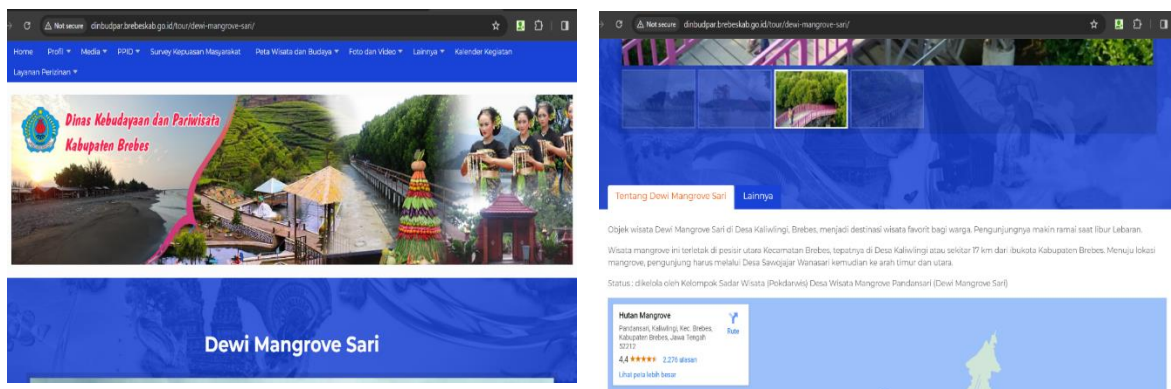
Promosi merupakan aktivitas komunikasi untuk memberikan informasi kepada khalayak umum yang bersifat persuasif guna meningkatkan penjualan suatu produk atau jasa. Pada sektor pariwisata, promosi menjadi elemen penting dalam penyelenggaraan wisata karena dapat digunakan sebagai sarana memperkenalkan produk wisata kepada wisatawan, membangun citra objek wisata dan meningkatkan minat wisatawan untuk melakukan kunjungan wisata. Dalam pelaksanaan pengembangan desa wisata, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi dan mempromosikan potensi desa wisata sebagaimana yang tertera dalam Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 11 Tahun 2021 tentang Desa Wisata. Penyelenggaraan kegiatan promosi desa wisata menjadi bagian integral dari

kegiatan promosi pariwisata daerah yang memerlukan upaya kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan.

Era digitalisasi saat ini, pemerintah telah berupaya melakukan transformasi digital dalam memberikan pelayanan publik dan berinteraksi dengan masyarakat. Dengan memanfaatkan teknologi digital dan inovasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi sehingga pelayanan publik yang diberikan dapat berkualitas. Kegiatan promosi wisata daerah yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Brebes merupakan salah satu bentuk dari pelayanan publik yang telah memanfaatkan teknologi digital melalui *website* resmi milik Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Brebes (*dinbudpar.brebeskab.go.id*). Pada pelaksanaannya, upaya promosi wisata yang dijalankan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Brebes belum optimal. Bukti kurangnya promosi wisata dapat dilihat dari kegiatan promosi desa wisata melalui pemanfaatan teknologi informasi *website* yang belum efektif.

Gambar 1.5

Website Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Brebes



Sumber : Website Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Brebes (2024)

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa informasi yang tersedia mengenai Desa Wisata Kaliwlingi pada *website* milik Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Brebes tidak lengkap. Informasi yang diberikan hanya mengenai profil singkat dan tidak mencakup aspek atraksi serta amenitas wisata yang tersedia di desa wisata, gambar destinasi wisata yang ditampilkan pada *website* kurang atraktif dan tidak ada keterbaruan informasi yang dilakukan secara berkala. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Brebes dalam pengembangan desa wisata belum berjalan dengan baik sehingga masyarakat umum kesulitan dalam mengakses informasi terkait Desa Wisata Kaliwlingi. Keberjalanan kegiatan promosi wisata yang kurang efektif tersebut akan berakibat pada penurunan jumlah kunjungan wisatawan dan pendapatan yang diperoleh. Terkait data jumlah kunjungan wisatawan Desa Wisata Kaliwlingi dapat dilihat dari tabel 1.5 dan data jumlah pendapatan Desa Wisata Kaliwlingi dapat dilihat dari tabel 1.6.

Tabel 1.5
Jumlah Kunjungan Wisatawan Desa Wisata Kaliwlingi

Tahun	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Orang) Desa Wisata Kaliwlingi	Persentase Penurunan (%)
2019	132.936	33%
2020	52.784	60%
2021	35.871	32%
2022	25.929	28%
2023	14.161	45%

Sumber : Kelompok Sadar Wisata Dewi Mangrove Sari (2023)

Mengacu pada tabel 1.4 diatas, dapat diketahui bahwa dalam lima tahun terakhir jumlah kunjungan wisatawan Desa Wisata Kaliwlingi mengalami penurunan yang drastis. Jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2019 mencapai 132.936 orang, kemudian pada tahun 2020 jumlah kunjungan wisatawan mengalami penurunan yang drastis menjadi 52.784 orang. Pada tahun 2021, penurunan jumlah kunjungan wisatawan kembali terjadi menjadi 35.871 orang. Kemudian pada tahun 2022 jumlah kunjungan wisatawan turun menjadi 25.929 orang dan pada tahun 2023 jumlah kunjungan wisatawan turun menjadi 14.161 orang. Sejalan dengan kondisi penurunan jumlah kunjungan wisatawan Desa Wisata Kaliwlingi, jumlah pendapatan Desa Kaliwlingi juga ikut mengalami penurunan. Data penurunan jumlah pendapatan tersebut dapat dilihat pada tabel 1.6.

Tabel 1.6
Jumlah Pendapatan Desa Wisata Kaliwlingi

Tahun	Jumlah Pendapatan (Juta) Desa Wisata Kaliwlingi	Persentase Penurunan (%)
2019	1.510.610.000	8%
2020	569.790.000	62%
2021	436.755.000	23%
2022	202.546.000	54%
2023	83.252.500	59%

Sumber : Kelompok Sadar Wisata Dewi Mangrove Sari (2023)

Mengacu pada tabel 1.5 dapat diketahui bahwa jumlah pendapatan Desa Wisata Kaliwlingi menunjukkan kondisi yang kian menurun selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2019 jumlah pendapatan sebesar Rp. 1.510.610.000. Pada tahun 2020 jumlah pendapatan mengalami penurunan secara drastis menjadi Rp. 569.790.000. Pada tahun 2021 jumlah pendapatan

kian menurun menjadi Rp. 436.755.000. Lalu pada tahun 2022, jumlah pendapatan kembali menurun Rp. 202.546.000. Kemudian pada tahun 2023 jumlah pendapatan menurun menjadi 83.252.500.

Fenomena diatas tidak terlepas dari adanya permasalahan yang menyangkut komitmen *stakeholders* dalam pelaksanaan kolaborasi pengembangan Desa Wisata Kaliwlingi. Permasalahan komitmen menjadi tantangan dalam pelaksanaan proses kolaborasi. Komitmen adalah sebuah bentuk keterikatan *stakeholders* untuk berpartisipasi dalam menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab sehingga kolaborasi dapat berjalan optimal. Komitmen memiliki peran sentral dan menjadi faktor utama yang memfasilitasi pelaksanaan kolaborasi. Dalam hal ini, komitmen yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Brebes dalam proses kolaborasi pengembangan desa wisata tidak berjalan dengan baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan ketidakmampuan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Brebes dalam menjalankan tugas tanggung jawabnya untuk mengakomodir kebutuhan publik melalui penyediaan informasi dan promosi wisata yang sudah diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 11 Tahun 2021 tentang Desa Wisata.

Menyadari akan permasalahan diatas, Pemerintah Kabupaten Brebes memerlukan upaya kerjasama atau kemitraan dengan *stakeholders* lain untuk mengatasi permasalahan yang kompleks. Konsep kerjasama yang diaplikasikan dalam pengembangan Desa Wisata Kaliwlingi menggunakan konsep *collaborative governance*. Hal itu karena fokus *collaborative*

governance ada pada kebijakan dan masalah publik. Menurut Ansell & Gash (2008), *collaborative governance* merupakan suatu proses pengambilan keputusan secara kolektif antara satu atau lebih lembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah dengan tujuan untuk menerapkan kebijakan publik dan mengelola aset publik (Danastry & Kurniawan, 2021). Dalam konteks ini, *collaborative governance* adalah sebuah model yang mana dalam membangun suatu daerah, pemerintah tidak bisa mengelolanya sendiri. Oleh sebab itu, peran dan fungsi pemerintah tidak lagi dominan, melainkan diperlukan kontribusi dari pemangku kepentingan lainnya untuk menyelesaikan permasalahan dan memenuhi kebutuhan publik.

Kemitraan yang dilakukan pemerintah dengan institusi diluar pemerintah dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu: (1) kolaborasi antar institusi pemerintah (internal), (2) kolaborasi antara institusi pemerintah dan sektor bisnis; dan (3) kolaborasi antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil (Astuti & Warsono, dkk., 2020). Kerjasama dengan beberapa *stakeholders* tersebut perlu dilakukan karena sebagai bentuk implementasi pelayanan publik dan mewujudkan pengembangan Desa Wisata Kaliwlingi yang optimal.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, timbul pertanyaan penelitian yaitu mengapa proses ***Collaborative Governance*** dalam Pengembangan Desa Wisata Kaliwlingi di Kabupaten Brebes belum optimal.

1.2. Perumusan Masalah

Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses *collaborative governance* dalam pengembangan Desa Wisata Kaliwlingi di Kabupaten Brebes?
2. Apa faktor penghambat *collaborative governance* dalam pengembangan Desa Wisata Kaliwlingi di Kabupaten Brebes?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis proses *collaborative governance* dalam pengembangan Desa Wisata Kaliwlingi di Kabupaten Brebes.
2. Menganalisis faktor penghambat proses *collaborative governance* dalam pengembangan Desa Wisata Kaliwlingi di Kabupaten Brebes.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh suatu manfaat yang berguna dengan harapan antara sebagai berikut:

a. Kegunaan Akademis

Penelitian ini menjadi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Pendidikan Strata-I Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro dan mendorong kemahiran dalam berpikir secara kritis, sistematis, keilmuan dan saintifik bagi penulis serta menghasilkan sebuah karya ilmiah atas dasar kajian teori.

b. Kegunaan Praktis

Temuan penelitian ini harapannya dapat memberikan manfaat bagi pemerintah dan masyarakat untuk memaksimalkan potensi sumber daya daerah yang ada sehingga bisa dikembangkan menjadi desa wisata. Adanya penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi instansi/lembaga/pihak terkait yang memiliki kepentingan saat melaksanakan *collaborative governance* dalam pengembangan Desa Wisata Kaliwlingi. Melalui penelitian ini juga diharapkan masyarakat juga dapat aktif berpartisipasi dan mendukung pemerintah dalam mengembangkan potensi pariwisata yang tersedia di daerahnya.

1.5. Kajian Teori

1.5.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai cara berpikir logis dalam sebuah penelitian dan digunakan untuk menemukan bahan yang relevan untuk penelitian selanjutnya. Dalam penelitian ini digunakan beberapa referensi dari penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan fokus *collaborative governance* dan pengembangan pariwisata.

Penelitian Akbar, Robet, dkk (2022) menyatakan bahwa *collaborative governance* dalam pengembangan Desa Wisata Gubuklakah telah dilakukan secara optimal yang ditandai dengan pertumbuhan perekonomian masyarakat Desa Gubugklakah. Keberhasilan kolaborasi tersebut didukung oleh faktor kepemimpinan dan desain institusional.

Penelitian Ardiansyah, Falda (2023) menyatakan bahwa *collaborative governance* dalam pengembangan pariwisata Pantai Dewa Ruci Jatimalang belum dilakukan secara maksimal. Pelaksanaan kolaborasi yang belum maksimal tersebut disebabkan oleh 3 (tiga) faktor penghambat diantaranya lemahnya komitmen pemangku kepentingan, ketidakjelasan aturan yang menyangkut kolaborasi dan akses terhadap kekuasaan yang terbatas.

Penelitian Farizky, Vonny, dkk (2022) menyatakan bahwa tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan merupakan strategi yang sangat diperlukan dalam upaya pemulihan sektor pariwisata di masa *new normal* dengan menerapkan prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Penelitian Kanita (2023) menyatakan bahwa *collaborative governance* dalam pengembangan wisata Goa Pindul Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul belum maksimal. Ketidakmaksimalan kolaborasi tersebut terjadi karena dimensi kepemimpinan fasilitatif tidak terpenuhi dan belum terpenuhinya dimensi membangun kepercayaan serta membangun komitmen pada proses kolaborasi. Faktor struktur sosial merupakan faktor penghambat dalam pelaksanaan kolaborasi, sedangkan faktor kultural menjadi faktor pendorong pelaksanaan kolaborasi.

Penelitian Lubis, Anwar (2023) menunjukkan bahwa pengelolaan desa wisata di Kabupaten Tapanuli Selatan melalui *collaborative governance* belum optimal dibuktikan dengan kurangnya keterlibatan dan kesadaran masyarakat karena sosialisasi, pembinaan serta koordinasi dari dinas pariwisata masih belum optimal.

Penelitian Maulia, E. I., & Setiyono, B (2023) menunjukkan bahwa pelaksanaan kolaborasi dalam pengembangan Desa Wisata Nglanggeran berjalan baik dan mempunyai manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Keberhasilan ini dicapai melalui kontribusi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat. Namun dalam kerberjalanannya kolaborasi, masih ditemukan hambatan yaitu perbedaan visi dari *stakeholder* yang sulit disatukan, distribusi manfaat yang diterima masyarakat belum merata, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, dan adanya regenerasi kepengurusan.

Penelitian Nuh, Mohammad, dkk (2024) menunjukkan bahwa *collaborative governance* dalam pengembangan Desa Wisata Kemirahan

sudah berjalan baik yang ditunjukkan dengan adanya kolaborasi dan koordinasi antar *stakeholders* yang saling terkait, adanya dua peraturan terkait lembaga adat dan pelestarian budaya yang membuka peluang kerjasama dengan pemangku kepentingan, adanya berbagai kegiatan sosialisasi, dan diskusi terbuka untuk mendukung kolaborasi antar pemangku kepentingan secara internal di desa dan dengan pemangku kepentingan eksternal.

Penelitian Pambudi, Sulung, dkk (2020) menyatakan bahwa pengembangan Desa Wisata Kalipucang melalui *collaborative governance* sudah berjalan baik, hal itu dapat dilihat dari keterlibatan aktor (pemerintah, swasta dan masyarakat) mulai dialog tatap muka, membangun kepercayaan sehingga memperoleh manfaat ekonomi, lingkungan dan sosial politik.

Penelitian Rodiyah, Isnaini, dkk (2021) menyatakan bahwa pengembangan Pengembangan pariwisata Pulau Lusi melalui *collaborative governance* belum dilaksanakan secara optimal. Faktor yang dibuktikan dengan adanya ketimpangan peran dan keterlibatan antar *stake holder* dalam kolaborasi dan ketidakjelasan aturan mengenai legitimasi antar aktor.

Penelitian Soenarjanto (2021) menyatakan bahwa keberjalanan proses *collaborative governance* dalam pengembangan Desa Wisata Gununganyar sudah dilakukan yang dibuktikan dengan kerjasama antar pemangku kepentingan saling mendukung satu sama lain. Tetapi keberjalanannya belum maksimal karena adanya faktor penghambat kolaborasi diantaranya lemahnya komitmen terhadap proses, tidak ada kejelasan tata kelola,

pembagian akuntabilitas yang tidak jelas, informasi bersama yang terbatas, dan keterbatasan sumberdaya

Penelitian Utami, Aninda, dkk (2020) menyatakan bahwa pelaksanaan *collaborative governance* pengembangan Desa Wisata Kemetul belum terlaksana secara maksimal karena terdapat kendala seperti aturan yang kurang jelas, pemahaman antar *stakeholders* yang kurang baik, dan rendahnya komitmen diantara *stakeholders*.

Penelitian Vandayani, Dynda, dkk (2022) menyatakan pengembangan Desa Wisata di Kampung Majapahit melalui *collaborative governance* belum berjalan baik karena belum terdapat dasar kolaborasi selain MoU kesepakatan dan terdapat perbedaan pandangan terhadap kolaborasi yang dilakukan.

Tabel 1.6 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/ Tahun	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Metode	Hasil Penelitian
1.	Akbar, Robet, dkk (2022)	Menganalisis praktik <i>collaborative governance</i> dalam pengembangan Desa Wisata Gubuklakah.	- <i>Collaborative governance</i> dari Ansell & Gash - Faktor Keberhasilan dari Ansell & Gash	Kualitatif	<i>Collaborative governance</i> dalam pengembangan Desa Wisata Gubuklakah telah dilakukan secara optimal yang ditandai dengan pertumbuhan perekonomian masyarakat Desa Gubugklakah. Keberhasilan kolaborasi tersebut didukung oleh faktor kepemimpinan dan desain institusional.
2.	Ardiansyah, Falda (2023)	Menganalisis <i>collaborative governance</i> dalam pengembangan pariwisata Pantai Dewa Ruci Jatimalang.	- <i>Collaborative governance</i> dari Ansell & Gash - Faktor keberhasilan kolaborasi dari Edward De Seve	Kualitatif	<i>Collaborative governance</i> dalam pengembangan pariwisata Pantai Dewa Ruci Jatimalang belum dilakukan secara maksimal. Pelaksanaan kolaborasi yang belum maksimal tersebut disebabkan oleh 3 (tiga) faktor penghambat diantaranya lemahnya komitmen pemangku kepentingan, ketidakjelasan aturan yang menyangkut kolaborasi dan akses terhadap kekuasaan yang terbatas.
3.	Farizky, Vonny, dkk (2022)	Menganalisis <i>collaborative governance</i> dalam meningkatkan pariwisata di masa Pandemi COVID-19 di Indonesia.	- <i>Collaborative governance</i> dari Ansell & Gash	Kualitatif	Tata kelola kolaboratif (<i>collaborative governance</i>) yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan merupakan strategi yang sangat diperlukan dalam upaya pemulihan sektor pariwisata di masa new normal dengan menerapkan prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan.
4.	Kanita (2023)	Menganalisis <i>Collaborative Governance</i> dalam pengembangan wisata Goa Pindul Desa	- <i>Collaborative governance</i> dari Ansell & Gash	Kualitatif	<i>Collaborative governance</i> dalam pengembangan wisata Goa Pindul Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul belum maksimal. Ketidakmaksimalan kolaborasi tersebut terjadi karena dimensi kepemimpinan fasilitatif tidak terpenuhi dan

		Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul beserta faktor pendukung dan penghambat.	- Faktor Keberhasilan kolaborasi dari Soedarmo		belum terpenuhinya dimensi membangun kepercayaan serta membangun komitmen pada proses kolaborasi. Faktor struktur sosial merupakan faktor penghambat dalam pelaksanaan kolaborasi, sedangkan faktor kultural menjadi faktor pendorong pelaksanaan kolaborasi.
5.	Lubis, Anwar (2023)	Menganalisis dan membandingkan tata kelola 6 desa wisata di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan.	- <i>Collaborative governance</i> dari Ansell & Gash	Kualitatif	Pengelolaan desa wisata di Kabupaten Tapanuli Selatan melalui <i>collaborative governance</i> belum optimal dibuktikan dengan kurangnya keterlibatan dan kesadaran masyarakat karena sosialisasi, pembinaan serta koordinasi dari dinas pariwisata masih belum optimal.
6.	Maulia, E. I., & Setiyono, B. (2023)	Menganalisis proses <i>collaborative governance</i> dalam pengembangan Desa Wisata Nglanggeran dan menganalisis dampak digitalisasi desa wisata.	- <i>Collaborative governance</i> dari Ansell & Gash	Kualitatif	Pelaksanaan kolaborasi dalam pengembangan Desa Wisata Nglanggeran berjalan baik dan mempunyai manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Keberhasilan ini dicapai melalui kontribusi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat. Namun dalam kerberjalan kolaborasi, masih ditemukan hambatan yaitu perbedaan visi dari stakeholder yang sulit disatukan, distribusi manfaat yang diterima masyarakat belum merata, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, dan adanya regenerasi kepengurusan.
7.	Nuh, Mohammad, dkk (2024)	Mengkaji penerapan model <i>collaborative governance</i> dalam memberikan perhatian kearifan sosial dan pengembangan Desa Wisata Kemirahan	- <i>Collaborative governance</i> dari Ansell & Gash	Kualitatif	<i>Collaborative Governance</i> dalam pengembangan Desa Wisata Kemirahan sudah berjalan baik yang ditunjukkan dengan adanya kolaborasi dan koordinasi antar <i>stakeholders</i> yang saling terkait, adanya dua peraturan terkait lembaga adat dan pelestarian budaya yang membuka peluang kerjasama dengan pemangku kepentingan, adanya berbagai kegiatan sosialisasi, dan diskusi terbuka untuk mendukung kolaborasi antar

		Kabupaten Banyuwangi sehingga menjadi destinasi wisata berkelanjutan.			pemangku kepentingan secara internal di desa dan dengan pemangku kepentingan eksternal.
8.	Pambudi, Sulung, dkk (2020)	Menganalisis <i>Collaborative governance</i> dalam pengembangan Desa Wisata Kalipucang.	- <i>Collaborative governance</i> dari Ansell & Gash	Kualitatif	Pengembangan Desa Wisata Kalipucang melalui <i>Collaborative governance</i> sudah berjalan baik, hal itu dapat dilihat dari keterlibatan aktor (pemerintah, swasta dan masyarakat) mulai dialog tatap muka, membangun kepercayaan sehingga memperoleh manfaat ekonomi, lingkungan dan sosial politik.
9.	Rodiyah, Isnaini, dkk (2021)	Menganalisis <i>Collaborative governance</i> dalam pengembangan pariwisata Pulau Lusi di Sidoarjo pada masa <i>new normal</i> .	- <i>Collaborative governance</i> dari Emerson & Nabatchi.	Kualitatif	Pengembangan pariwisata Pulau Lusi melalui <i>collaborative governance</i> belum dilaksanakan secara optimal yang dibuktikan dengan adanya ketimpangan peran dan keterlibatan antar <i>stake holder</i> dalam kolaborasi, tidak adanya landasan hukum dan MoU yang mengatur legitimasi antar aktor.
10.	Soenarjanto, Bagoes, dkk (2021)	Mendeskripsikan <i>collaborative governance</i> dalam proses pengembangan Desa Wisata Gununganyar	- <i>Collaborative governance</i> dari Ratner - Faktor keberhasilan kolaborasi dari Edward De Seve	Kualitatif	Keberjalanan proses <i>collaborative governance</i> dalam pengembangan Desa Wisata Gununganyar sudah dilakukan yang dibuktikan dengan kerjasama antar pemangku kepentingan saling mendukung satu sama lain. Tetapi keberjalanannya belum maksimal karena adanya faktor penghambat kolaborasi diantaranya lemahnya komitmen terhadap proses, tidak ada kejelasan tata kelola, pembagian akuntabilitas yang tidak jelas, informasi bersama yang terbatas, dan keterbatasan sumberdaya.

11.	Utami, Aninda, dkk (2020)	Menganalisis <i>collaborative governance</i> dan faktor yang menunjang keberhasilannya dalam pengembangan Desa Wisata Kemetul.	- <i>Collaborative governance</i> dari Ansell & Gash.	Kualitatif	Pengembangan desa wisata Kemetul melalui <i>collaborative governance</i> belum terlaksana secara maksimal karena terdapat kendala seperti aturan yang kurang jelas, pemahaman antar <i>stakeholder</i> yang kurang baik, dan rendahnya komitmen diantara <i>stakeholder</i> .
12.	Vandayani, Dynda, dkk (2022)	Menganalisis <i>collaborative governance</i> dalam pengembangan Desa Wisata di Kampung Majapahit Desa Bejijong Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto.	- <i>Collaborative governance</i> dari Ansell & Gash - Faktor keberhasilan kolaborasi dari Edward De Seve	Kualitatif	Pengembangan Desa Wisata di Kampung Majapahit melalui <i>collaborative governance</i> belum berjalan baik karena belum terdapat dasar kolaborasi selain MoU kesepakatan dan adanya perbedaan pemahaman terhadap kolaborasi yang dilakukan.

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu yang tertera diatas, dapat diketahui bahwa konsep *collaborative governance* telah diimplementasikan dalam berbagai kegiatan pariwisata. Adanya penelitian terdahulu sangat memberikan manfaat bagi peneliti yaitu menjadi referensi dalam penulisan dan menjadi bahan perbandingan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang dilakukan serta menghindari terjadinya kesamaan.

Berdasarkan kedua belas referensi penelitian terdahulu yang digunakan, peneliti menemukan adanya persamaan dan perbedaan dalam penelitian. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus penelitian yang membahas *collaborative governance* dalam pengembangan wisata. Persamaan selanjutnya adalah metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Kemudian, persamaan berikutnya adalah memiliki tujuan penelitian untuk menganalisis *collaborative governance* dalam pengembangan wisata. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah terletak pada teori yang berbeda untuk menganalisis *collaborative governance* dan faktor penghambat *collaborative governance* dalam pengembangan desa wisata. Teori yang digunakan untuk menganalisis *collaborative governance* menggunakan teori dari Ansell dan Gash (2008), sementara teori yang digunakan untuk menganalisis faktor penghambat kolaborasi menggunakan teori dari Mattessich & Monsey (1992). Selanjutnya, perbedaan lainnya yaitu penelitian ini lebih memfokuskan pada proses kolaborasi menggunakan model proses kolaboratif dari teori

collaborative governance milik Ansell dan Gash untuk menganalisis pengembangan Desa Wisata Kaliwlingi di Kabupaten Brebes melalui dimensi dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama dan hasil sementara.

1.5.2. Administrasi Publik

Dalam buku *The Study of Public Administration*, Dwight Waldo (1950) mendefinisikan bahwa administrasi publik merupakan suatu manajemen dan organisasi dari manusia dan peralatannya untuk mencapai tujuan pemerintah. Berdasarkan pendapat Chander dan Plano (dalam Keban, 2004) administrasi publik diartikan sebagai proses pengorganisasian dan koordinasi sumber daya serta personel publik untuk merumuskan, menerapkan, dan melaksanakan keputusan publik. Sementara itu, menurut Henry (dalam Pasolong, 2008) turut memberikan pendapatnya mengenai administrasi publik yang dapat diartikan bahwa administrasi publik merupakan kombinasi kompleks antara teori dan praktik yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang diaturnya serta mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial.

1.5.3. Paradigma Administrasi Publik

A. Paradigma 1

Paradigma ini dikenal dengan dikotomi politik dan administrasi. Paradigma dikotomi politik-administratif menitikberatkan pada pemisahan isu-isu politik dan administratif dimana muatan ilmu politik

hanya hanya mencakup isu-isu politik, pemerintahan, dan kebijaksanaan seperti menciptakan kebijakan atau melahirkan keinginan-keinginan negara, sedangkan muatan ilmu administrasi menitikberatkan pada isu-isu organisasi, kepegawaian, dan penyusunan anggaran dalam sistem birokrasi pemerintah dan berkenaan dengan pelaksanaan dari kebijakan-kebijakan tersebut (Anwarudin, 2004).

B. Paradigma 2

Paradigma kedua menitikberatkan pada prinsip-prinsip administrasi yang dapat berlaku secara menyeluruh di setiap bentuk organisasi baik publik maupun privat dan lingkungan sosial budaya tanpa mengenal adanya batasan. Dengan mempelajari prinsip-prinsip administrasi dan implementasinya, maka para administrator akan berkompeten dan ahli dalam pekerjaannya. Prinsip administrasi yang populer yakni prinsip yang diajukan oleh Gulick & Urwick yaitu POSDCRB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting*).

C. Paradigma 3

Paradigma ini merupakan sebuah upaya untuk mengklarifikasi kembali hubungan antara administrasi negara dan ilmu politik. Penekanan pada paradigma ini pada lokus yakni birokrasi pemerintahan, dan fokus pada wilayah kepentingan.

D. Paradigma 4

Paradigma ini muncul sebagai respons terhadap paradigma ketiga, di mana pada paradigma tersebut, meskipun administrasi negara kembali ke akarnya dalam ilmu politik, administrasi negara dianggap sebagai entitas sekunder dalam konteks politik, sehingga beberapa tokoh administrasi negara melakukan pencarian alternatif lain. Istilah ilmu administrasi di sini merujuk pada semua kajian dalam teori organisasi dan manajemen dengan tujuan meningkatkan efisiensi serta efektivitas program-program dengan lebih akurat. Teori organisasi menggunakan kontribusi dari ilmu jiwa sosial, administrasi niaga, administrasi negara, dan sosiologi untuk mempelajari serta memahami perilaku organisasi. Di sisi lain, ilmu manajemen mengandalkan statistik, komputer, analisis sistem, ekonomi, dan sejenisnya. Fokus pada konsep ini lebih diutamakan daripada lokasinya.

E. Paradigma 5

Paradigma ini dikenal sebagai paradigma administrasi publik yang berfokus pada administrasi publik itu sendiri. Perkembangan dari administrasi negara menjadi ilmu administrasi negara terjadi dalam paradigma ini. Menurut Osborne dan Gaebler, paradigma ini dimulai dengan serangkaian krisis yaitu 1) ketidakmampuan pemerintah dalam menangani masalah publik; 2) besarnya birokrasi yang membuat akses informasi cepat namun dianggap tidak sebanding dengan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat; 3) penurunan produktivitas kerja

pegawai akibat sistem birokrasi konvensional; 4) kurangnya kemampuan pemerintah Amerika dalam melayani masyarakat. Paradigma ini merupakan tahap peralihan dari administrasi tradisional menuju *New Public Management*. Fokusnya adalah pada teori organisasi, manajemen, dan kebijakan publik.

F. Paradigma 6

Paradigma keenam yang dapat disebut juga dengan paradigma *governance* muncul pada akhir tahun 1990. *Governance* diartikan sebagai pelaksanaan kekuasaan atau otoritas oleh pemimpin politik agar tercapainya kesejahteraan rakyat. Proses ini kompleks karena melibatkan berbagai sektor masyarakat yang memiliki kekuasaan dan menetapkan kebijakan publik, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi individu dan institusi. (Tamagoya, 2017). Gibson menjelaskan bahwa pada dasarnya, *governance* melibatkan kemitraan dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan. Kemitraan ini mencakup penduduk lokal, organisasi yang melayani masyarakat/daerah, sektor publik dan sektor swasta (Ikeanyibe et al., 2017).

UNDP mendefinisikan tata kelola secara luas, yaitu tata kelola sebagai suatu mekanisme kompleks yang melibatkan pelaksanaan wewenang politik, ekonomi, dan administratif untuk mengelola urusan suatu negara. Tata kelola tidak hanya mencakup negara, tetapi juga mencakup organisasi masyarakat sipil dan sektor swasta, karena

semuanya terlibat dalam kegiatan yang mendorong pembangunan manusia berkelanjutan.

Pada paradigma *governance*, terdapat beberapa jenis yaitu *good governance*, *network governance* dan *collaborative governance*. Penelitian ini merupakan bagian dari paradigma ke-6 administrasi publik yaitu *governance*. Dalam paradigma ini terdapat beberapa jenis *governance* yang salah satunya ada *collaborative governance*. Fokus administrasi publik dalam penelitian ini adalah *collaborative governance* dalam pengembangan desa wisata sementara lokusnya adalah di Desa Wisata Kaliwlingi, Kabupaten Brebes.

1.5.4. Governance

Governance adalah bentuk terminologi yang digunakan sebagai pengganti istilah *government* yang mana merujuk pada pelaksanaan kekuasaan atau penggunaan otoritas politik untuk kesejahteraan warga negara. Istilah *governance* memberikan gambaran secara khusus terkait perubahan peran pemerintah sebagai pemberi layanan kepada fasilitator dan perubahan kepemilikan dari milik negara ke milik rakyat. Pada paradigma *governance*, rakyat turut andil dalam proses yang kompleks seperti ikut memegang kekuasaan, membentuk dan menyebarluaskan kebijakan publik. Hal tersebut berdampak langsung pada masyarakat dan lembaga serta pembangunan ekonomi dan sosial (Tamayao, 2014).

Menurut pendapat Rhodes (1996), konsep *governance* merupakan gambaran dari adanya perubahan arti penting pemerintahan yang mengacu

pada a) suatu proses baru dalam memerintah; b) perubahan kondisi dalam tata aturan dan c) metode baru mengenai partisipasi dalam pemerintahan. Pokok utama dari paradigma *governance* adalah bahwa seiring dengan perkembangan masyarakat yang semakin pesat dan munculnya isu-isu yang kian kompleks sehingga harus segera diselesaikan. Institusi pemerintah yang beragam serta kekuatan masyarakat madani yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan (*policy making*), hasil akhir (*outcome*) yang memuaskan dari kebijakan publik tidak mungkin tercapai jika hanya mengandalkan pemerintah saja (Kurnia, 2010).

Governance membutuhkan sektor lain dalam hal penyediaan layanan, sementara pemerintah hanya mengatur dan memberikan arahan. Tindakan *governance* lebih menekankan pada kolaborasi, dimana setiap aktor berinteraksi dan saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan bersama. Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang disampaikan Ewalt (dalam Astuti & Warsono, dkk., 2020) bahwa secara keseluruhan “*governance*” mensyaratkan penyerahan pelayanan (desentralisasi/pembagian kekuasaan dan fungsi) kepada jaringan organisasi nirlaba, perusahaan swasta maupun kepada tingkat pemerintahan lainnya.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli mengenai *governance* yang telah disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa *governance* merupakan sebuah konsep yang merujuk pada proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan yang melibatkan beberapa pihak seperti pemerintah, sektor privat dan masyarakat demi tercapainya tujuan bersama.

1.5.5. *Collaborative Governance*

Collaborative governance menurut Ansell dan Gash (dalam Kirana & Artisa, 2020) adalah suatu proses pembentukan, pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan pengaturan organisasi lintas sektor yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan kebijakan publik yang tidak dapat diselesaikan oleh satu organisasi saja. *Collaborative governance* merupakan model pengendalian yang dilakukan oleh satu atau lebih lembaga publik secara langsung, yang melibatkan para pemangku kepentingan *non-state* dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal (Islamy, 2018).

Terdapat enam karakteristik *collaborative governance* menurut Ansell dan Gash (dalam Febrian, 2016), antara lain :

1. Pendirian forum diprakarsai oleh lembaga publik atau aktor-aktor terlibat.
2. Aktor non pemerintah turut berpartisipasi dalam forum tersebut.
3. Semua peserta memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan dan pengambilan keputusan.
4. Pelaksanaan forum terorganisir secara formal dan bersama sama.
5. Forum yang diadakan bertujuan untuk mengambil keputusan secara bersama-sama atau berorientasi pada konsensus.
6. Kolaborasi tidak hanya berfokus pada kebijakan publik, tetapi juga tertuju pada pengelolaan publik.

Ansell dan Gash (dalam Tilano & Suwitri, 2019) menjelaskan tentang model *collaboration governance* yang memiliki 4 variabel:

1. *Starting Condition*

Starting condition adalah fase permulaan dalam pembentukan hubungan, di mana setiap aktor dengan kepentingan dan tujuan berbeda memutuskan untuk bekerjasama mencapai visi dan tujuan bersama. Tahapan ini juga dipengaruhi oleh sejarah kerjasama atau konflik yang dapat memfasilitasi atau menghambat kolaborasi, serta oleh ketidakseimbangan kekuatan sumber daya, kekuatan, atau pengetahuan.

2. Kepemimpinan fasilitatif

Kepemimpinan fasilitatif memegang peran sentral dalam tata kelola kolaboratif, yang terkait dengan mengarahkan para pemangku kepentingan ke dalam forum untuk mencapai kesepakatan mengenai penetapan aturan yang jelas, membangun kepercayaan, berbagi manfaat bersama, dan memberdayakan mereka.

3. Desain institusional

Desain institusional yang terkait dengan regulasi dasar yang disepakati dalam kolaborasi tidak hanya ditetapkan oleh satu pihak untuk dilaksanakan. Keberhasilan kolaborasi tergantung pada keterlibatan semua pihak yang terdampak dan saling peduli terhadap isu yang ada. Ini juga terkait dengan transparansi, di mana para

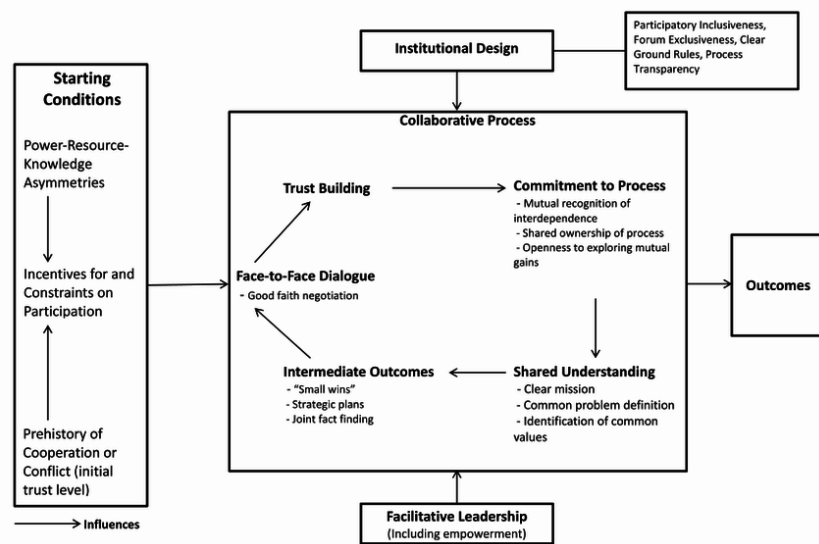
pemangku kepentingan yakin bahwa prosesnya adil, merata, dan terbuka.

4. Proses kolaborasi

Proses kolaborasi ini memiliki beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:

- a. Dialog tatap muka.
- b. Membangun kepercayaan.
- c. Komitmen terhadap proses.
- d. *Share understanding*.
- e. Hasil sementara.

Gambar 1.4
Model Collaborative governance Ansell & Gash



Sumber : Ansell & Gash (2008)

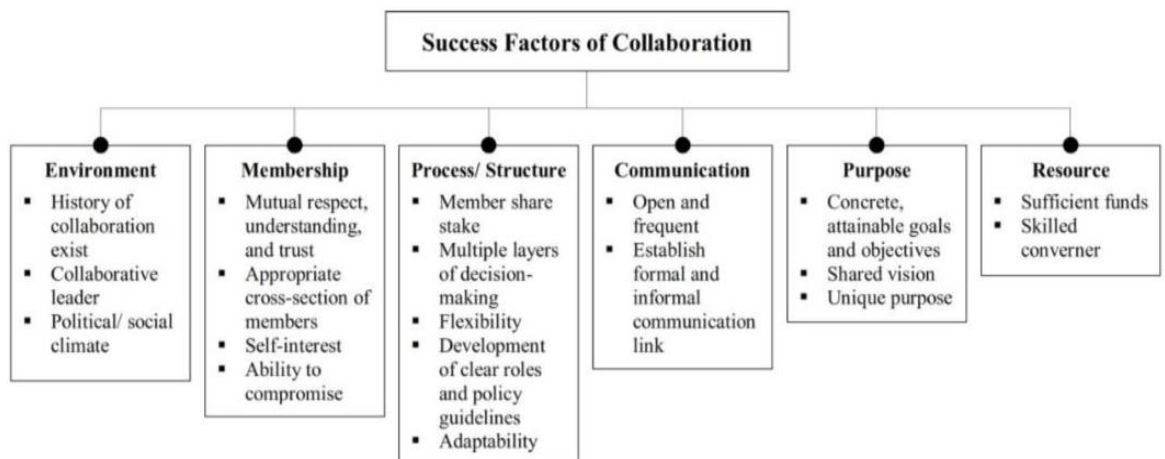
Pada gambar 1.4 dapat dilihat tahapan dari model *collaborative governance* Ansell dan Gash. Model ini terdiri dari kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, desain institusional dan proses kolaboratif.

1.5.6. Faktor yang Mempengaruhi Proses *Collaborative governance*

Menurut Mattessich dan Monsey (dalam Astuti & Warsono, 2020), terdapat 19 faktor yang dapat menentukan keberhasilan kolaborasi dan diklasifikasikan menjadi enam kelompok yaitu (1) lingkungan, (2) keanggotaan, (3) proses/struktur, (4) komunikasi, (5) tujuan, dan (6) sumber daya. Klasifikasi keberhasilan kolaborasi tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1.5

Faktor yang Mempengaruhi Kolaborasi Menurut Mattessich & Monsey



Sumber : Mattessich dan Monsey (1992)

1. Lingkungan

Lingkungan merupakan bagian penting dalam proses kolaboratif karena lingkungan yang baik menciptakan suasana terbaik untuk berkolaborasi. Konteks ini dapat mencakup sejarah kolaborasi antar pemangku kepentingan, pemimpin kolaboratif, dan iklim politik/sosial. Arah kolaborasi dapat ditentukan dari hubungan sejarah kerjasama, apakah dapat mendorong atau menghambat proses kolaborasi yang mana setiap pemangku kepentingan mempunyai perbedaan kepentingan dan tujuan. Kepemimpinan kolaboratif adalah kemampuan untuk memfasilitasi dan memediasi proses kolaboratif dan menciptakan lingkungan kolaboratif antar pemangku kepentingan. Kemudian, dinamika politik/sosial terkadang mempengaruhi proses kolaborasi.

2. Keanggotaan

Keanggotaan menjadi salah satu unsur yang mampu menentukan berhasil atau tidaknya suatu kolaborasi. Dalam pelaksanaan kolaborasi, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat saling menghormati, memahami dan percaya satu dengan yang lain. Kolaborasi yang dilandasi dengan rasa saling menghormati, memahami dan percaya diantara pemangku kepentingan yang terlibat maka akan memudahkan pelaksanaan tugas dan fungsi dari masing-masing aktor, serta meningkatkan

peran dan tanggung jawab sehingga kolaborasi dapat berjalan optimal.

3. Proses/Struktur

Komponen struktur mencakup kepemilikan bersama, pengambilan keputusan pada berbagai tingkatan, fleksibilitas, pengembangan aturan yang jelas dan pedoman kebijakan dan kemampuan beradaptasi. Membentuk rasa kepemilikan pada setiap pemangku kepentingan dalam proses kolaborasi merupakan hal yang sangat penting dilakukan karena akan membuat pemangku kepentingan terdorong untuk memberikan kontribusi yang baik sehingga kolaborasi dapat berjalan optimal. Kepemilikan bersama dalam kolaborasi dapat digambarkan sebagai kondisi saling memiliki dan saling bergantung antar *stakeholders* sehingga dalam pelaksanaan kolaborasi mereka lebih mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi.

Pengambilan keputusan bersama merupakan aspek krusial dalam proses kolaborasi. Pengambilan keputusan bersama mengedepankan keterlibatan atau partisipasi seluruh *stakeholders* untuk mengatasi permasalahan yang ada di dalam kolaborasi dengan pertimbangan yang hati-hati sehingga memperoleh sebuah solusi yang memuaskan semua pihak dan meminimalisir terjadinya kerugian pada pihak tertentu. Dalam kolaborasi, seluruh *stakeholders* diharapkan memiliki kemampuan fleksibilitas karena

dapat menjadi pendorong dalam kolaborasi. Fleksibilitas berkaitan dengan kemampuan menyesuaikan diri terhadap berbagai situasi yang dinamis dan berubah-ubah dengan cepat. Hal itu tentu dapat membantu *stakeholders* untuk menghadapi tantangan dan menyelesaikan masalah yang kompleks dalam kolaborasi. Pengembangan aturan yang jelas dan pedoman kebijakan diperlukan dalam sebuah kolaborasi. Dengan adanya aturan yang jelas, *stakeholders* dapat memahami peran, hak, dan tanggung jawab serta menjalankan tanggung jawab sesuai dengan aturan. Hal terpenting lainnya adalah kemampuan beradaptasi yang dimiliki oleh partisipan kolaborasi. Kemampuan beradaptasi merupakan kemampuan untuk mempertahankan diri di tengah-tengah permasalahan perubahan besar, bahkan jika perlu mengubah beberapa tujuan utama, anggota, dan lain-lain, untuk menghadapi perubahan kondisi.

4. Komunikasi

Komunikasi memiliki peranan sentral dan menjadi suatu kebutuhan dalam pelaksanaan kolaborasi karena pada dasarnya *stakeholders* yang terlibat dalam proses kolaborasi memerlukan interaksi sosial untuk membahas pemecahan suatu masalah. Upaya pemecahan masalah membutuhkan komunikasi yang terbuka atau jelas dan langsung. Komunikasi terbuka dapat membantu menciptakan kesamaan visi dan pemahaman antar *stakeholders*

sementara frekuensi komunikasi yang sering dilakukan dapat membangun hubungan dan koordinasi yang baik. Membangun hubungan yang baik dengan *stakeholders* dapat dilakukan melalui komunikasi formal maupun informal.

5. Tujuan

Tujuan yang nyata dan dapat dicapai, visi bersama dan tujuan unik merupakan beberapa elemen penentu keberhasilan kolaborasi. Hal ini dimulai dengan adanya pemahan bersama antar pemangku kepentingan terhadap permasalahan yang dihadapi sehingga memerlukan nilai dan visi bersama serta tujuan kolaborasi yang tepat.

6. Sumber Daya

Sumber daya merupakan unsur pokok dalam pelaksanaan kolaborasi. Ketersediaan sumber daya yang memadai terutama sumber daya modal dan sumber daya manusia dapat menjadi faktor penunjang keberhasilan kolaborasi. Dana yang cukup memungkinkan pemangku pentingan lebih berkembang sehingga kontribusi yang diberikan oleh pemangku kepentingan di dalam kolaborasi dapat meningkat. Sementara tenaga terampil yang disatukan dapat meningkatkan produktivitas kerja sehingga tugas dan tanggung jawab pemangku kepentingan dalam kolaborasi dapat diselesaikan dengan hasil yang maksimal.

1.5.7. Pengembangan Pariwisata

Wibowo (2010) mengungkapkan bahwa pengembangan adalah upaya untuk meningkatkan suatu objek agar lebih baik dan bermanfaat bagi kepentingan bersama. Sementara itu, menurut Anindita (2015), pengembangan pariwisata merupakan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan daya tarik objek wisata, baik dari segi tempat maupun semua elemen yang ada di dalamnya sehingga dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung.

Syamsuridjal (dalam Sinaga, 2010), berpendapat bahwa sebuah objek wisata dapat dikembangkan jika memiliki beberapa unsur berikut :

1. Atraksi wisata, mencakup segala hal yang menjadi ciri khas atau keunikan yang mampu menarik wisatawan untuk berkunjung.
2. Aksesibilitas, mengacu pada kemudahan dalam mencapai lokasi wisata tersebut.
3. Fasilitas pendukung, merupakan fasilitas yang tersedia di sekitar objek wisata seperti akomodasi penginapan dan restoran.
4. Kelembagaan, lembaga atau organisasi yang bertanggung jawab dalam mengelola objek wisata tersebut.

Pendapat mengenai aspek pengembangan pariwisata juga disampaikan oleh Badrudin (dalam Sari, 2011) yaitu :

1. Atraksi, merupakan daya tarik yang dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu *site attraction* dan *event attraction*. *Site attraction* adalah daya tarik fisik yang bersifat permanen dengan lokasi tetap, sedangkan *event attraction* adalah atraksi sementara yang lokasinya bisa berubah.

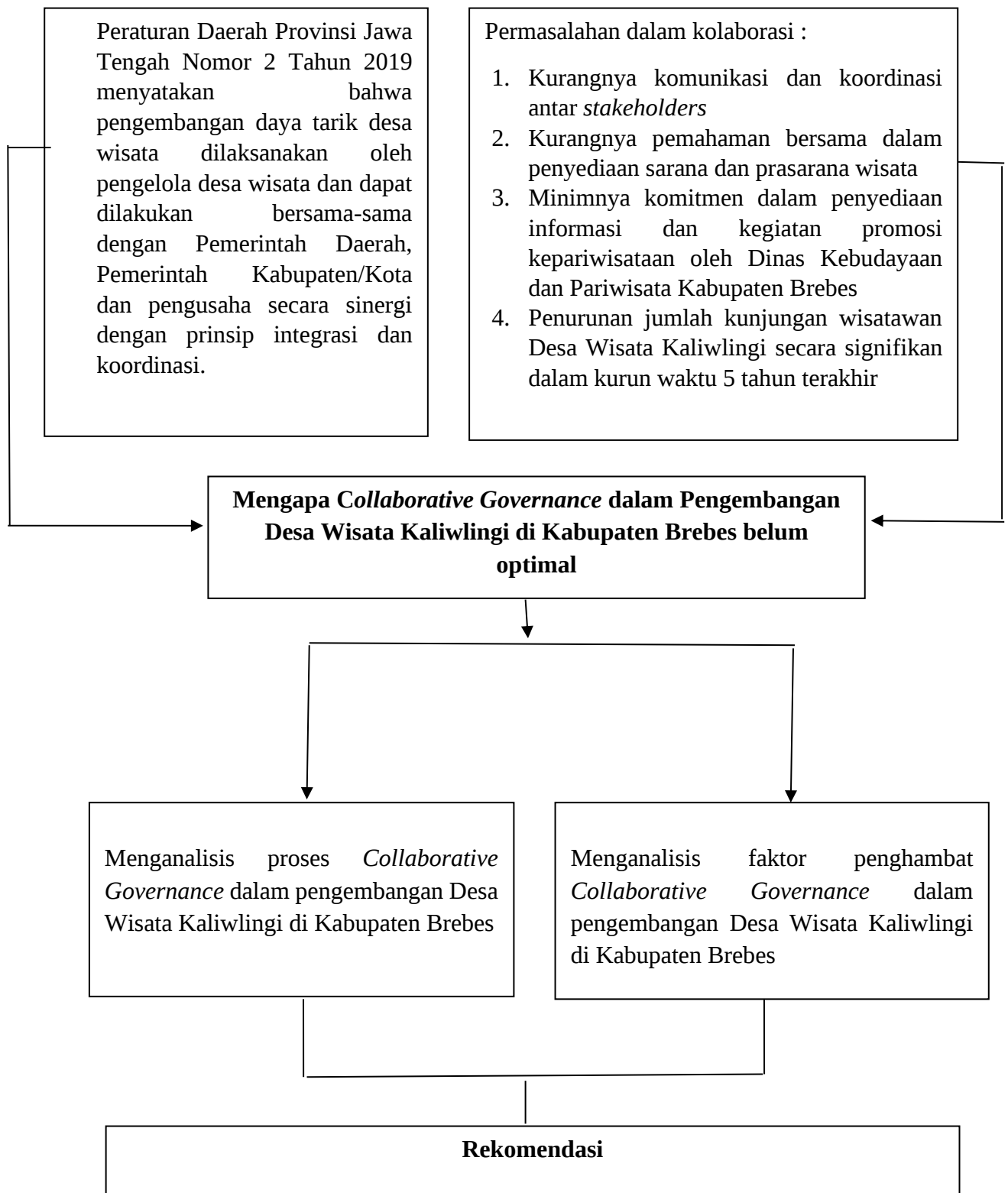
2. Fasilitas, berfokus pada daya tarik suatu lokasi. Fasilitas harus terletak dekat dengan pasarnya. Wisatawan biasanya membutuhkan fasilitas seperti penginapan, toko souvenir, restoran dan lain sebagainya.
3. Infrastruktur, infrastruktur dasar di suatu daerah yang dapat dimanfaatkan oleh wisatawan dan masyarakat lokal untuk mendukung pengembangan pariwisata.
4. Transportasi, meliputi moda transportasi darat, udara maupun laut yang digunakan oleh wisatawan.
5. Hospitalitas, fasilitas pelayanan yang mencakup keamanan dan perlindungan bagi wisatawan agar mereka merasa aman dan nyaman selama berwisata.

1.5.8. Desa Wisata

Atmoko (2014) mendefinisikan desa wisata sebagai desa yang memiliki keunikan dan daya tarik khas, berupa karakter fisik lingkungan alam pedesaan dan kehidupan sosial budaya masyarakat setempat. Keunikan ini mampu menjadi sebuah atraksi wisata melalui pengembangan fasilitas pendukung pariwisata. Pengembangan desa wisata ini diharapkan dapat menciptakan pemerataan yang tepat dan sejalan dengan konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan sehingga produk wisata memiliki nilai tambah bagi budaya pedesaan dan menjaga agar nilai budaya dalam pengembangan desa wisata tidak memudar.

Astuti (2012) menambahkan bahwa desa wisata adalah desa yang mampu menyajikan suasana pedesaan yang autentik dari berbagai aspek kehidupan sosial dan budaya, kegiatan sehari-hari, serta tata ruang desa yang dapat dikembangkan menjadi potensi atraksi wisata. Sementara itu, Hermawan (2016) berpendapat bahwa desa wisata merupakan suatu kawasan yang berkaitan erat dengan kearifan lokal, seperti adat istiadat, potensi atau budaya yang dikelola sebagai atraksi wisata sesuai dengan kemampuannya dan bertujuan untuk kepentingan sosial serta ekonomi masyarakat.

1.6. Kerangka Pemikiran Teoritis



1.6. Fenomena Penelitian

Fenomena penelitian merupakan suatu proses penguraian konsep penelitian menjadi bagian-bagian yang lebih rinci sehingga lebih mudah dipahami dan diukur. Dasar penelitian ini menggunakan konsep *Collaborative governance*. *Collaborative governance* adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah guna membuat keputusan yang ditujukan sebagai solusi atas permasalahan publik yang bersifat kompleks. Dengan demikian, pemerintah perlu melakukan upaya kerjasama dengan masyarakat dan aktor non-pemerintah. Berdasarkan penelitian mengenai *Collaborative Governance* dalam Pengembangan Desa Wisata Kaliwlingi di Kabupaten Brebes, maka dapat dikaji lebih lanjut berdasarkan fenomena penelitian berikut.

Tabel 1.7 Fenomena Penelitian

Fokus Penelitian	Fenomena	Subfenomena	Gejala yang Diamati
<i>Collaborative Governance</i> dalam Pengembangan Desa Wisata Kaliwlingi di Kabupaten Brebes	Proses Kolaboratif	Dialog Tatap Muka	1. Pemangku kepentingan yang terlibat 2. Ruang komunikasi antar <i>stakeholders</i>
		Membangun Kepercayaan	1. Upaya <i>stakeholders</i> membangun kepercayaan 2. Waktu yang diperlukan dalam membangun kepercayaan
		Komitmen Terhadap Proses	1. Tanggung jawab terhadap tujuan pelaksanaan program 2. Adanya rasa saling ketergantungan antar <i>stakeholders</i>

		Pemahaman Bersama	1. Pembentukan dan pemahaman nilai bersama yang akan dicapai dari proses kolaborasi 2. Misi dan tujuan yang jelas dalam kolaborasi
		Hasil Sementara	1. Pembentukan rencana strategis 2. Kemenangan kecil (<i>small wins</i>)
Faktor Penghambat <i>Collaborative Governance</i> dalam Pengembangan Desa Wisata Kaliwlingi di Kabupaten Brebes	Faktor Penghambat Kolaborasi	Lingkungan	1. Sejarah adanya kolaborasi 2. Pemimpin kolaboratif 3. Dinamika politik/sosial
		Keanggotaan	1. Saling menghormati, memahami dan kepercayaan 2. Ketepatan anggota 3. Kepentingan bersama 4. Kemampuan berkompromi
		Struktur	1. Kepemilikan bersama 2. Pengambilan keputusan pada berbagai tingkatan 3. Fleksibilitas 4. Pengembangan aturan yang jelas dan pedoman kebijakan 5. Kemampuan beradaptasi
		Komunikasi	1. Komunikasi terbuka dan frekuensi komunikasi 2. Membangun tautan komunikasi formal dan informal

		Tujuan	1. Tujuan dan sasaran yang nyata dan dapat dicapai 2. Visi bersama 3. Tujuan yang unik
		Sumber Daya	1. Sumber Dana 2. Sumber Daya Manusia

1.7. Argumen Penelitian

Penelitian ini didasari oleh keingintahuan peneliti mengenai *collaborative governance* dalam pengembangan Desa Wisata Kaliwlingi di Kabupaten Brebes yang merupakan destinasi wisata unggulan, akan tetapi pada kenyataannya ditemukan beberapa indikasi permasalahan yang terjadi didalam hubungan kolaborasi antar *stakeholders*. Dengan munculnya berbagai permasalahan tersebut, penulis berpendapat bahwa *collaborative governance* yang sedang berlangsung belum mencapai potensi maksimalnya, yang mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor. Kondisi ini diperkirakan akan berdampak pada keberhasilan atau kegagalan dalam pengembangan Desa Wisata Kaliwlingi di Kabupaten Brebes. Hal ini menimbulkan pertanyaan yakni bagaimana proses *collaborative governance* dalam pengembangan Desa Wisata Kaliwlingi di Kabupaten Brebes? Serta apa faktor penghambat *collaborative governance* dalam pengembangan Desa Wisata Kaliwlingi di Kabupaten Brebes? Dari rumusan masalah ini, diharapkan penelitian akan memberikan jawaban terhadap kendala-kendala yang muncul dalam praktik *collaborative governance* yang belum optimal dalam pengembangan Desa Wisata Kaliwlingi di Kabupaten Brebes.

1.8. Metode Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Pendekatan ini dipilih guna memahami dan mendalami fenomena yang berakar dari konteks sosial. Pada penelitian ini melibatkan pengamatan terhadap manusia dan interaksi mereka dengan lingkungan sekitar, serta mengumpulkan pandangan dan pengalaman mereka sebagai sumber informasi yang relevan bagi peneliti. Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif dengan tujuan membentuk gambaran serta menganalisis laporan yang diperoleh dari tanggapan responden serta kajian tentang situasi yang dihadapi dengan tujuan untuk memberikan gambaran masalah secara rinci. Peneliti menggunakan dan memilih metode penelitian ini untuk mengetahui fenomena yang bersangkutan dengan *collaborative governance* dalam pengembangan Desa Wisata Kaliwlingi.

1.8.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif analisis, yaitu penelitian bertujuan untuk menggambarkan secara rinci objek penelitian serta menganalisis fenomena sosial, dalam hal ini adalah *collaborative governance* dalam Pengembangan Desa Wisata Kaliwlingi. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan dan merangkum berbagai kondisi dan situasi. Penelitian ini berupaya mengungkap realitas yang ada dalam masyarakat sebagai objek penelitian serta menarik realitas tersebut ke permukaan sebagai ciri,

karakter, sifat, model, tanda atau gambaran mengenai kondisi, situasi atau fenomena tertentu (Bungin, 2008).

1.8.2. Situs Penelitian

Situs adalah tempat dimana penelitian dilakukan untuk memperoleh informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian. Penetapan situs lokasi merupakan tahap krusial dalam penelitian kualitatif karena dengan menentukan situs penelitian, objek dan tujuan peneliti sudah jelas sehingga memberikan kemudahan bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian. Situs pada penelitian ini dapat ditemukan di Desa Wisata Kaliwlingi Kabupaten Brebes.

1.8.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merujuk kepada individu atau kelompok yang berperan sebagai informan yang dapat memberikan informasi terkait fenomena yang akan diselidiki. Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan adalah teknik *purposive sampling* dan teknik *snowball*. Menurut Sugiyono (2023) *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut dimaksudkan agar informan yang dipilih sesuai dengan pengetahuan, kompetensi dan kebutuhan data sehingga memperoleh data yang tepat. *Snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang awalnya berjumlah sedikit lama-lama menjadi besar (Sugiyono, 2023). Peneliti menggunakan teknik *snowball sampling* karena jumlah sumber data yang

sedikit belum mampu memberikan data yang memuaskan, sehingga peneliti mencari informan lain yang dapat digunakan sebagai sumber data. Subjek dari penelitian ini adalah *stakeholders* yang terlibat pada *collaborative governance* dalam pengembangan Desa Wisata Kaliwlingi yaitu :

1. Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Produk Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Brebes
2. Kepala Desa Kaliwlingi
3. Ketua Kelompok Sadar Wisata Desa Wisata Kaliwlingi
4. Anggota Pokdarwis Dewi Mangrove Sari Pokja Daya Tarik Wisata
5. Anggota Pokdarwis Dewi Mangrove Sari Pokja Manajemen Pengelolaan
6. Masyarakat Desa Kaliwlingi
7. Wisatawan

1.8.4. Jenis Data

Menurut Sugiyono (2023), data dalam penelitian dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Dalam penelitian ini, peneliti memakai data kualitatif. Data kualitatif berfungsi untuk memberikan penjelasan terhadap suatu informasi secara rinci. Data ini dapat berupa kata-kata atau kalimat yang dapat didefinisikan. Selain itu, data tambahan seperti dokumen, foto dan sebagainya juga termasuk dalam data kualitatif.

1.8.5. Sumber Data

Mengacu pada pendapat Lofland (dalam Moleong, 2010), sumber data adalah kata-kata secara lisan yang dicatat oleh peneliti, kegiatan dilapangan yang diamati oleh peneliti dan data pelengkap seperti dokumen dan sumber lain. Pada penelitian, sumber data diperoleh dari dua macam yaitu :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung dari narasumber di lapangan. Penelitian ini memperoleh data primer dari hasil wawancara dengan informan berupa kata-kata dan pernyataan yang dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian serta pengamatan di lapangan terkait dengan *collaborative governance* dalam pengembangan Desa Wisata Kaliwlingi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang tidak langsung. Data sekunder menjadi data penunjang bagi data primer berupa dokumen tertulis, arsip, informasi dan lain-lain yang diperoleh dari sumber kedua seperti jurnal, hasil penelitian terdahulu, buku yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari:

1. Dokumen-dokumen terkait dari pengembangan desa wisata.
2. Perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.
3. *Website* milik Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa

Tengah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Brebes,
Badan Pusat Statistik.

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan data berupa fakta. Dalam sebuah penelitian, teknik pengumpulan data merupakan hal yang bersifat krusial karena merupakan suatu instrumen pada proses pengumpulan informasi sebagai data yang dibutuhkan dalam penelitian. Tanpa memahami teknik pengumpulan data, peneliti tidak dapat memperoleh data yang memenuhi standar yang telah ditetapkan. Terdapat beberapa teknik yang digunakan dalam pengumpulan data agar data yang terkumpul relevan dan data yang diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan yang disertai dengan pencatatan-pencatatan terhadap kondisi atau perilaku objek sasaran. Pada penelitian ini, teknik observasi yang digunakan adalah observasi partisipasi pasif. Kegiatan observasi dilakukan dengan cara pengamatan langsung dan pencatatan di Desa Wisata Kaliwlingi di Kabupaten Brebes untuk mengumpulkan beragam data yang memiliki kaitan dengan *Collaborative Governance* dalam Pengembangan Desa Wisata Kaliwlingi di Kabupaten Brebes tetapi tidak terlibat dalam kegiatan tersebut. Hasil dari kegiatan

observasi berupa gambaran kondisi, aktivitas, objek dan realita yang dicari dalam pengamatan langsung di Desa Wisata Kaliwlingi di Kabupaten Brebes.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dan sistematis untuk mendapatkan informasi yang komprehensif dalam bentuk pernyataan-pernyataan lisan terkait suatu objek atau peristiwa yang terjadi pada masa lalu, kini dan yang akan datang melalui format tanya jawab yang dilakukan antara pewawancara dan narasumber menggunakan alat yang disebut pedoman wawancara (*interview guide*). Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah tidak terstruktur dengan narasumber yang dipilih sesuai dengan pengetahuan, kompetensi dan kebutuhan data. Menurut Sugiyono (2023), wawancara tidak berstruktur adalah wawancara bebas yang bersifat bebas, dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Sebaliknya, pedoman wawancara hanya mencakup garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat serta menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh pihak lain mengenai subjek tersebut. Bentuk dokumen dapat berupa gambar, tulisan, catatan penting, arsip,

laporan, artikel yang berkaitan dengan pengembangan Desa Wisata Kaliwlingi.

1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data adalah sebuah proses pengolahan dan penyusunan data dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi secara sistematis dengan mengklasifikasikan data tersebut kedalam kategori, penjabaran kedalam unit-unit, mengidentifikasi pola, pemilihan informasi yang penting dan penarikan kesimpulan yang mudah dipahami. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis interaktif. Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2023), analisis data kualitatif yang dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai tuntas.

Terdapat tiga hal utama dalam kegiatan analisis intrepretasi data ini yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses menyusun informasi pokok dan menekankan aspek-aspek yang relevan sesuai dengan fokus penelitian dari berbagai sumber seperti observasi, wawancara, dokumen tertulis, dan materi audio visual. Tujuan dari proses ini adalah untuk memberikan gambaran yang lebih terperinci dan memfasilitasi pengumpulan data selanjutnya sesuai kebutuhan penelitian. Data yang terkumpul akan dianalisis dan dihubungkan dengan teori terkait, dengan peneliti melakukan penyusunan,

seleksi, dan pengklasifikasian data yang berkaitan dengan pengembangan Desa Wisata Kaliwlingi dalam konteks *collaborative governance*.

2. Penyajian data

Setelah melalui proses reduksi data, langkah berikutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan melalui narasi teks yang dapat berupa uraian singkat, tabel, diagram, *flowchart*, grafik, dan format lainnya. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman peneliti serta membantu dalam merencanakan langkah-langkah selanjutnya berdasarkan hasil data yang telah diperoleh.

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Kesimpulan awal yang didasarkan pada bukti-bukti yang valid dan diperoleh dari lapangan akan memberikan kredibilitas pada kesimpulan tersebut. Meskipun penelitian kualitatif mungkin tidak selalu dapat menjawab rumusan masalah secara langsung sejak awal, kesimpulan akan terus berkembang seiring dengan proses penelitian di lapangan. Setelah data terkumpul dan disajikan, data tersebut akan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan. Kesimpulan yang dihasilkan akan terkait erat dengan *collaborative governance* dalam pengembangan Desa Wisata Kaliwlingi. Tiga komponen tersebut harus saling terkait, dimulai dengan pengumpulan data melalui wawancara lapangan.

Data yang diperoleh kemudian akan direduksi, dan penyajian data akan membantu dalam menarik kesimpulan dari data yang telah diolah tersebut.

1.8.8. Kualitas Data

Terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian, yaitu kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data (Sugiyono, 2023). Kualitas instrumen penelitian berkaitan dengan cara data dikumpulkan, dan sebaliknya, kualitas pengumpulan data juga mempengaruhi instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang menghasilkan data valid dan reliabel sangat bergantung pada pengumpulan data yang tepat. Sebaliknya, apabila teknik pengumpulan data tidak sesuai maka dapat mempengaruhi kualitas instrumen penelitian. Dalam penelitian ini, pengujian kredibilitas data dilakukan dengan menggunakan metode triangulasi teknik yakni mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Jika teknik pengujian kredibilitas tadi menghasilkan data yang berbeda, maka dibutuhkan sumber data lain untuk membuktikan data mana yang dianggap valid.